

# **Peranan Pemimpin Lokal dalam Pendidikan Nasional di Era Otonomi Daerah**

**Drs. Djariyo, M.Pd.**

Seperti sudah kita ketahui dan maklumi bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan 9 tahun (UU No. 20 Th 2003). Pendidikan dasar 9 tahun adalah bagian dari pendidikan nasional yang harus kita sukseskan dalam usaha meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada masa depan. Pendidikan dasar 9 tahun sendiri sebagai fundamen dasar pendidikan nasional harus tercapai secara sukses menata seluruh tanah air. Lebih-lebih dalam Era Otonomi Daerah (UU No.32 tahun 2004) tidak ada lagi alasan untuk tidak berhasil dalam mensukseskan pendidikan nasional. Akan tetapi untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan ini diperlukan banyak komponen yang berperan dan terlibat secara langsung,

Diantaranya adalah:

1. Para Pemimpin tingkat lokal
  2. Sarana Prasarana Pendidikan
  3. Guru Berkualitas
  4. Komite Sekolah
1. Pemimpin Tingkat Lokal dan Sarana Prasarana Pendidikan

Pemimpin tingkat lokal dalam era otonomi daerah yang pertama adalah bupati atau walikota setempat. Dalam hal ini pendidikan dasar pada suatu daerah menjadi maju atau mundur tergantung kebijaksanaan seorang bupati atau walikota. Bagi sekolah negeri mulai dari prasarana gedung, pendanaan, penugasan guru ada di tangan sang bupati/ walikota dan DPRD setempat. Atas dasar hal ini maka seorang bupati / walikota dan seseorang yang menjadi anggota DPRD seharusnya orang yang memahami masalah pendidikan dan arti pentingnya pendidikan sebagai barang investasi bagi masa depan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Minimal mereka memahami bahwa maju dan mundurnya masyarakat suatu daerah tergantung pada tingkat pendidikan masyarakatnya. Apabila pemimpin lokal paham dan peduli masalah pendidikan, sebagian besar tugasnya sukses. Dia akan mewariskan generasi penerus yang berwawasan luas. Kemakmuran masyarakat akan datang dengan sendirinya, sebab mereka berpendidikan dan berwawasan luas. Aktivitas dan

kreativitas masyarakat niscaya tumbuh berkembang dengan sendirinya. Oleh sebab itu, gubernur, bupati dan walikota tidak salah jika memperhatikan perkembangan, pendidikan masyarakatnya. Bahkan pemimpin lokal pada tingkat paling bawah seperti para camat, dan para kepala desa/lurah pun perlu paham persoalan pendidikan di wilayahnya.

Pada umumnya di tingkat propinsi pendelegasian gubernur dalam bidang pendidikan tidak ada masalah. Akan tetapi pada tingkat kabupaten dan kota masih banyak masalah, apalagi pada tingkat lebih bawah seperti tingkat kecamatan dan desa /kelurahan.

Memang pada tingkat kabupaten dan kota ada pejabat Kepala Dinas Pendidikan Nasional tingkat kabupaten/kota. Akan tetapi tugas dan wewenang jabatan ini belum maksimal. Apalagi jika personal yang ditugasi sebagai tidak memahami dan menguasai bidang pendidikan. Pejabat yang demikian hanya akan bekerja di belakang meja.

Untuk menyukseskan pendidikan nasional, pada tingkat kecamatan seharusnya juga dibentuk dewan pendidikan di wilayah kecamatan pada saat sekarang sudah ada pendidikan tingkat SLTP baik negeri maupun swasta. Bahkan sudah ada pendidikan tingkat SLTA baik negeri maupun swasta. Sebab itu, para camat setempat yang memiliki wilayah yang demikian harus memiliki peran serta dalam memajukan masyarakat di wilayahnya pemerintah tingkat kecamatan beserta segenap masyarakat lingkungannya memiliki tanggung jawab atas kemajuan pendidikan di wilayahnya. Tugas ini tidak bisa terlepas dari tugas camat selaku pemimpin daerah beserta jajarannya.

Untuk pemerintah tingkat desa kelurahan, peranan kepala desa / kepala kelurahan pun harus ditingkatkan di dalam pendidikan pada tingkat sekolah dasar / MI. Pada satu desa atau kelurahan saat sekarang ada 3 (tiga) bahkan sampai 4 (empat) sekolah dasar negeri, bahkan jika ditambah dengan Madrasah Ibtidaiyah (MI) bisa lebih dari itu. Terkadang ada SD Swasta baik yang keagamaan maupun yang kebangsaan nasional. Apabila para pimpinan setempat ini memiliki kepedulian di dalam pendidikan, bahkan hal yang mustahil untuk dapat meningkatkan pendidikan di daerah masing – masing.

Pendidikan ditingkat Taman Kanak- kanak (TK) pun perlu diperankan yang sama tentang keberadaan kepala desa / kepala kelurahan. Setiap ada pilkades / maupun penugasan lurah harus dicermati visi dan misi yang terkait dengan dunia

pendidikan. Hanya dengan maju secara bersama–sama kita bisa membangun pendidikan nasional yang maju lagi tangguh. Tidak ada lagi berita gedung sekolah ambruk/roboh sebab tidak terawat, karena mulai pemerintahan tingkat desa / kelurahan sampai kecamatan peduli pada dunia pendidikan.

## 2. Guru Berkualitas

Pada masa depan, guru baik tingkat TK, SD, MI, SMP/ Tsanawiyah, SMA/ Madrasah Aliyah (MA), dan SMK serta yang sederajat minimal berpendidikan sarjana (SI) UU No.20 th 2003 dan UU No. 14 Th 2005. Bahkan bisa jadi lebih tinggi lagi seperti (S2). Hal ini berarti mau tidak mau akan mewarnai masyarakat tempat mereka bertinggal atau berdiam. Hal ini pasti mempengaruhi masyarakat dalam pencalonan kepala desa / lurah dituntut berpendidikan (S1) jika tidak ingin tertinggal dengan pendidikan para guru tersebut. Para guru TK, SD, MI, SMP, Tsanawiyah, SMA, MA, SMK yang sarjana adalah juga ilmuwan. Sebagai seorang ilmuwan seharusnya mereka memiliki kebebasan akademik yang bertanggung jawab. Gagasan – gagasan superior guru bisa jadi menjadi landasan inspirasi pembangunan di daerah tempat tugas.

Terkait dengan guru masa depan yang berkualitas tersebut, jelas berbeda jauh dengan guru masa lalu. Sebab itu pemberlakuan pemerintah terhadap guru harus meningkat (UU No.14 th 2005) dan PP No.74 th 2008. Bahkan harus berbeda. Sebab selama ini rata–rata guru dipensiun hanya pada golongan IV/a (seperti dihukum) meski masa pengabdianya lebih dari 35 tahun. Birokrasi model, seperti ini ke depan harus diubah. Penyediaan sarana sekolah untuk meningkatkan kualitas guru perlu mendapat perhatian. Perpustakaan sekolah dasar yang selama ini hanya berisi buku pelajaran SD **harus ditingkatkan diisi dengan referensi-referensi ilmiah, jurnal ilmiah, majalah ilmiah** yang terkait dengan pendidikan dasar untuk menjadi bacaan para guru SD. Kenaikan anggaran pendidikan termasuk mewujudkan perpustakaan yang memadai pada tingkat pendidikan dasar.

Apabila perlu, guru pada pendidikan dasar ditugaskan studi lanjut ke-S2 bagi yang berprestasi. Diberi beasiswa studi lanjut ke-S2 bahkan bisa sampai ke-S3 bagi yang berprestasi.

Perihal penempatan pejabat struktural dalam bidang pendidikan haruslah ditempatkan orang yang paham bidang pendidikan. Organisasi profesi misalnya, dapat diminta pertimbangannya dalam hal ini PGRI.

Penyegaran atau pencerahan guru harus diadakan secara periodik, paling sedikit satu semester satu kali. Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga kesegaran ilmu guru agar gairah mengajar tetap bersemangat.

Apabila guru di seluruh tanah air sudah berkualitas dapat dipastikan kecerdasan segenap anak bangsa juga meningkat, rasa kemanusiaan juga meningkat nasionalisme mendarah daging, NKRI kokoh, kuat dan utuh sampai kapan juga.

### 3. Komite Sekolah beserta Peranannya

Komite sekolah sebagai wadah sekelompok orang yang benar-benar peduli bidang pendidikan harus bekerja secara jujur, profesional dan transparan serta terbuka menerima masukan-masukan. Komite sekolah memiliki tugas memajukan pendidikan, baik tingkat sarana, prasarana maupun kualitas.

Pemimpin komite sekolah harus orang yang paham bidang pendidikan, jangan sekedar formal dan jangan sebab kaya. Pemimpin komite sekolah bisa merangkul segenap masyarakat untuk memajukan pendidikan di daerahnya. Para saudagar para pakar diajak memikirkan kemajuan daerahnya secara bergotong royong. Dan juga mengajak segenap lapisan masyarakat secara adil sesuai dengan kapasitas masing-masing. Manusia terdidik yang cendekia tidak harus yang duduk di kantor-kantor. Mereka bisa di bidang peternakan, pertanian, jasa, industri, perdagangan dan lain-lain. Semua berhak sukses dan makmur karena berilmu lewat pendidikan.

### 4. Simpulan

- a. Keberhasilan dalam bidang pendidikan suatu daerah tidak cukup mengandalkan guru berkualitas, tetapi peran serta pejabat lokal dalam bidang pendidikan sangat diperlukan untuk mencapai sukses.
- b. Para pejabat lokal dalam era otonomi daerah dituntut berpendidikan minimal sarjana (S1) agar seimbang dengan pendidikan guru sehingga bewawasan luas dan bernasionalisme tinggi.
- c. Keutuhan NKRI semakin kuat kokoh jika masyarakat Indonesia berpendidikan / terpelajar.
- d. Guru memiliki andil yang sangat berarti untuk mengantarkan masyarakat menjadi cerdas, pandai, patriotik dan bernasionalisme mendalam.

## Daftar Pustaka

- Buchori, Muchtar. 1994. *Pendidikan dalam Pembangunan*. IKIP Muhammadiyah. Jakarta Press.
- Jones, James J & Donald L. Walters. 2008. *Human Resource Management in Education*. Sleman Yogyakarta: Q Media.
- Jurnal Pendidikan Dasar No. 10 Oktober Th. 2008. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.
- Nugraheni, Ismi Dwi Astuti. 2008. *Reformasi Kebijakan Pendidikan*.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.
- Salim, Agus. 2007. *Indonesia Belajarlah : Membangun Pendidikan Indonesia*. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Tiara Wacana.
- Tilaar, H.A.R. 1977. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi : Visi, Misi, dan Program Aksi Pendidikan dan Pelatihan Menuju 2020*. Jakarta: Grasindo.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan : Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta Penjelasannya. Bandung: Nuansa Aulia.
- Undang – Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Undang- Undang Otonomi Daerah. Pemerintahan Daerah Surabaya: Cahaya Ilmu.
- Undang – Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.